

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Unit analisis menjadi aspek penting karena berhubungan dengan tempat penelitian. Unit analisis yang digunakan adalah KPP Pratama Jakarta Kalideres. Alasan dipilihnya tempat tersebut adalah data dan informasi yang dibutuhkan mudah untuk diperoleh dan relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:80), populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu agar dapat dipelajari dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data bulanan yang terdiri dari laporan pencairan tunggakan pajak, laporan permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding, laporan surat teguran, dan laporan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020.

Menurut Sugiyono (2018:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik pengambilan sampel adalah *nonprobability sampling* berupa *sampling* jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan yang terdiri dari laporan pencairan tunggakan pajak, laporan permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding, laporan surat teguran, dan laporan surat paksa tahun 2017-2020, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 48 sampel (4 tahun x 12 bulan).

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data terdiri atas studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menggali informasi dari buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang Perpajakan, internet, media massa, dan sumber lainnya. Sedangkan dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data terkait topik permasalahan. Sumber data yaitu data sekunder berupa daftar pencairan tunggakan pajak, daftar permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding, dan daftar penagihan pajak yang diperoleh dari Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Waktu pengumpulan dan pengolahan data dimulai pada bulan November 2021 sampai dengan penelitian selesai ditulis.

## **C. Operasionalisasi Variabel**

### **1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

Variabel terikat yaitu variabel yang diberikan pengaruh variabel bebas.

Variabel terikatnya Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

#### **a. Definisi Konseptual**

Menurut Nainggolan (2015:9), pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan.

#### **b. Definisi Operasional**

Pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan STP, SKP, SKPKB, atau SKPKBT. Presentase pencairan tunggakan pajak diukur melalui

perbandingan jumlah pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah tunggakan pajak (Widiasfita, 2018:51). Data tersebut diperoleh dari data pencairan tunggakan pajak dari KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Data yang digunakan adalah data bulanan selama 4 tahun sehingga data yang digunakan berjumlah 48 data (12 bulan x 4 tahun).

Rumus pencairan tunggakan pajak adalah:

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

## **2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

Variabel bebas muncul untuk memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas terdiri atas Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ), Surat Teguran ( $X_2$ ), dan Surat Paksa ( $X_3$ ).

### **a. Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ )**

#### **1) Definisi Konseptual**

Kualitas penetapan pajak dinilai berkualitas baik apabila penetapan tersebut jumlahnya tidak berubah setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk menghapuskan sanksi, keberatan, dan banding kepada pihak yang berwenang. Sehingga menandakan bahwa fiskus dalam menetapkan pajak telah melalui pertimbangan yang matang dan menyertakan data yang akurat sehingga jumlah penetapannya konsisten (Hidayat & Cheisviyanny, 2013:3).

#### **2) Definisi Operasional**

Kualitas penetapan pajak dihitung, diolah, dan dikelompokkan secara manual oleh peneliti menggunakan tabel kategorisasi karena

fiskus tidak mempunyai rekapan langsung mengenai data kualitas penetapan pajak. Presentase kualitas penetapan pajak dihitung dengan cara membandingkan perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan setelah adanya permohonan pengurangan sanksi atau keberatan/banding (Supriadi & Hidayatullah, 2020:76). Data tersebut berasal dari daftar permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dan keberatan/banding dari KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Data yang digunakan adalah data bulanan selama 4 tahun sehingga data yang digunakan berjumlah 48 data (12 bulan x 4 tahun). Rumus untuk menghitung kualitas penetapan pajak adalah:

$$KPP = \frac{(\text{Nilai yang Diajukan} - \text{Nilai Keputusan Diterima})}{\text{Nilai Ketetapan yang Diajukan}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh rasio menggunakan rumus diatas, selanjutnya data dikelompokkan menggunakan kategorisasi sebagai acuan untuk menentukan bagaimana kualitas penetapan pajak yang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.1 Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak**

No.	Presentase	Kualitas Penetapan
1.	00,00 – 10,99	Sangat Tidak Baik
2.	20,00 – 30,99	Tidak Baik
3.	40,00 – 50,99	Kurang Baik
4.	60,00 – 70,99	Baik
5.	80,00 – 100	Sangat Baik

Sumber: Hidayat dan Cheisviyanny (2013)

Berdasarkan tabel diatas diketahui jika presentase kualitas penetapan pajak berada di bawah 20% maka penetapan pajak dikategorikan kedalam kriteria sangat tidak baik. Kemudian jika mencapai 60% maka termasuk kedalam kategori baik. Lalu jika

mencapai 80% ke atas maka dikatakan sangat baik. Semakin besar presentase penetapan pajak, maka semakin baik pula kualitas penetapan pajak tersebut.

## **b. Surat Teguran (X<sub>2</sub>)**

### **1) Definisi Konseptual**

PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (14) mengungkapkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan Surat Teguran dilakukan 7 hari setelah jatuh tempo untuk mengingatkan Wajib Pajak agar membayar pajak terutang sebagaimana tercantum pada STP, SKPKB, atau SKPKBT belum dilunasi.

### **2) Definisi Operasional**

Presentase Surat Teguran dihitung dengan membandingkan realisasi dan target pembayaran surat teguran dalam satuan rupiah (Widiasfita, 2018:52). Data tersebut diperoleh dari daftar Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020. Data yang digunakan adalah data bulanan selama 4 tahun sehingga data yang digunakan berjumlah 48 data (12 bulan x 4 tahun). Rumus untuk menghitung surat teguran adalah:

$$\text{Surat Teguran} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efektivitas Surat Teguran maka digunakan standar pengukuran dibawah ini:

**Tabel III.2 Standar Pengukuran Efektivitas Surat Teguran**

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Nasution dan Aliffioni (2018:135)

### c. Surat Paksa (X<sub>3</sub>)

#### 1) Definisi Konseptual

PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (15) mengungkapkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penerbitan Surat Paksa dilakukan 21 hari setelah Surat Teguran yang bersifat memaksa Wajib Pajak agar membayar pajak terutang serta biaya penagihan pajak.

#### 2) Definisi Operasional

Presentase Surat Paksa dihitung dengan cara membandingkan realisasi dan target pembayaran surat paksa dalam satuan rupiah (Widiasfita, 2018:53). Data tersebut berasal dari daftar Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Data yang digunakan adalah data bulanan selama 4 tahun sehingga data yang digunakan berjumlah 48 data (12 bulan x 4 tahun). Rumus untuk menghitung surat paksa adalah:

$$\text{Surat Paksa} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui efektivitas Surat Paksa maka digunakan standar pengukuran dibawah ini:

**Tabel III.3 Standar Pengukuran Efektivitas Surat Paksa**

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup efektif
60 – 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Nasution dan Aliffioni (2018:135)

#### **D. Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data diolah menggunakan SPSS versi 25. Jenis penelitian adalah statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana data diukur dalam bentuk angka-angka secara statistik kemudian dilakukan deskripsi data untuk menggambarkan mengenai pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

##### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Teknik ini merupakan pengujian paling dasar untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan sehingga informasi tersebut bermanfaat bagi para penggunanya yaitu dengan cara menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasi (tingkat penyimpangan) dari data penelitian (Ghozali, 2016).

##### **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data telah sesuai kriteria yang telah ditentukan dan tidak terjadi penyimpangan data. Jika data telah memenuhi kriteria maka pada data tersebut tidak terjadi penyimpangan dan layak diolah lebih lanjut ke tahap selanjutnya.

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data memiliki distribusi normal. Data dinyatakan baik jika data terdistribusi normal. Normalitas dapat dideteksi melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansinya  $> 0,05$  artinya data terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya  $< 0,05$  artinya data tidak terdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat kemiripan diantara variabel independen sehingga menyebabkan adanya korelasi yang kuat. Model regresi dikategorikan baik jika terbebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* atau nilai VIF. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$  artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sedangkan jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau nilai VIF  $> 10$  artinya terjadi gejala multikolinearitas.

**c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya). Model regresi dinyatakan baik apabila tidak terjadi masalah autokorelasi. Salah satu cara mendeteksinya yaitu menggunakan uji Runs Test. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  artinya tidak terdapat masalah autokorelasi, begitupun sebaliknya.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketimpangan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variannya tetap maka disebut homoskedastisitas yang artinya model regresi sudah baik, sedangkan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas yang menunjukkan ketidakakuratan dari hasil analisis regresi. Cara mendeteksinya adalah melalui grafik *scatterplot* dan Uji Glejser.

- 1) Grafik *Scatterplot*, dilakukan dengan cara menganalisis titik-titik data. Berikut ini kriteria pengambilan keputusan:
  - a. Apabila titik-titik berkumpul membentuk pola tertentu artinya terjadi heteroskedastisitas.
  - b. Apabila titik-titiknya tidak membentuk pola tertentu artinya tidak terdapat heteroskedastisitas.
- 2) Uji Glejser dilakukan untuk memperoleh hasil lebih akurat. Jika probabilitas signifikansi bernilai di atas 0,05 artinya terbebas dari heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan karena pada penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh, mengukur kekuatan hubungan, dan menunjukkan arah hubungan variabel bebas dan terikat. Persamaan regresi berganda pada penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pencairan Tunggalan Pajak

X<sub>1</sub> = Kualitas Penetapan Pajak

X<sub>2</sub> = Surat Teguran

X<sub>3</sub> = Surat Paksa

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Nilai koefisien regresi

$\alpha$  = Nilai konstanta

e = Variabel pengganggu (residual eror)

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Statistik T

Uji T bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu melalui pengukuran tingkat signifikan pada taraf 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Apabila nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka hipotesis dinyatakan diterima, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitupun sebaliknya.

##### b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan bernilai antara 0 hingga 1, apabila semakin mendekati satu artinya semakin baik kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen.